



edisi : 315 / Januari 2021

# ISEN MULANG

Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



**PEMROV DAN DPRD KALTENG SEPAKAT  
BAHAS LEBIH LANJUT TIGA RAPERDA**

7



**PEMROV KALTENG LUNCURKAN BUKU  
PEDOMAN TATA CARA PENGAKUAN  
KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

11



**WAKIL GUBERNUR RESMIKAN ATM BANK KALTENG  
DI DESA BATU AGUNG KECAMATAN SERUYAN TENGAH**

17



**BANTUAN SOSIAL  
TAHUN 2021  
DILUNCURKAN**

**DITERBITKAN BERDASARKAN  
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

***Pelindung :***

Gubernur Kalimantan Tengah

***Penasehat :***

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

***Pengarah :***

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

***Penanggung Jawab:***

Kepala Biro Administrasi Pimpinan  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

***Pemimpin Redaksi:***

Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan pada  
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

***Sekretaris Redaksi:***

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Biro  
Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

***Wakil Sekretaris Redaksi:***

Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Biro  
Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

***Koordinator Distribusi :***

Kepala Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan pada  
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

***Redaktur :***

Setya Sri Saryanta, Noriko Yunanto

***Penyedia Bahan :***

Rani Diah Anggraini

***Staf Redaksi :***

Dewi Yulianti, Dina Meitriana, Kamala Sri Y. R.,  
Winda Paskanova, Renny Patrisia,  
Nova Anggreni, Sophia Fitra Djangkan.

***Fotografer :***

Boy Irawan, Efendy, Eka Supriyaningsih, Joko Prabowo.

***Layout :***

Benito Zuares

***Operator Komputer :***

Kemala Sri Yadikawati Rasan

***Alamat Redaksi :***

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya

Telp/Fax (0536) 4200241

**Ijin Penerbitan Khusus**

**No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995**

**DAFTAR ISI :**

BANTUAN SOSIAL TAHUN 2021

DILUNCURKAN\_\_\_3

SEKDA KALTENG HADIRI PENANDATANGANAN  
KONTRAK TENDER DINI KEMENTERIAN PUPR TA  
2021 VIA VICON\_\_\_4

PROYEK KERETA API KALTENG KEMBALI DIBAHAS  
DALAM RAPAT PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
RENCANA ALOKASI ANGGARAN 2022-2024\_\_\_5

SERAP ASPIRASI, WAKIL KETUA MPR RI SJARIFUDIN  
HASAN BERI APRESIASI PEMDA KALTENG\_\_\_6

PEMROV DAN DPRD KALTENG SEPAKAT BAHAS  
LEBIH LANJUT TIGA RAPERDA\_\_\_7

WAGUB KALTENG HADIRI RAPAT PARIPURNA KE-2  
MASA SIDANGAN I TAHUN 2021\_\_\_8

DIBUKA PRESIDEN, GUBERNUR KALTENG HADIRI  
RAKERNAS PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN  
2021 SECARA VIRTUAL\_\_\_9

WAGUB KALTENG HADIRI PENYERAHAN VIRTUAL  
SK PERHUTANAN SOSIAL DAN TORA SE-INDONESIA  
OLEH PRESIDEN\_\_\_10

PEMROV KALTENG LUNCURKAN BUKU  
PEDOMAN TATA CARA PENGAKUAN KEBERADAAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT\_\_\_11

WAKIL GUBERNUR KALTENG HADIRI PELANTIKAN  
BADAN PELAKSANA HARIAN DAN DIREKSI RUMAH  
SAKIT MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA \_\_\_12

PEMERINTAH SIAPKAN LANGKAH ANTISIPASI  
PENULARAN COVID-19 DI TAHUN 2021\_\_\_13

GUBERNUR SUGIANTO SABRAN IKUTI RATAS  
RENCANA PELAKSANAAN VAKSINASI\_\_\_14

PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DI KALTENG  
DIMULAI HARI INI\_\_\_14

PENGENDALIAN COVID-19 PADA TAHUN 2021  
DIPRIORITASKAN PADA PENYEDIAAN DAN  
PEMBERIAN VAKSIN BAGI MASYARAKAT\_\_\_16

WAKIL GUBERNUR RESMIKAN ATM BANK KALTENG  
DI DESA BATU AGUNG KECAMATAN SERUYAN  
TENGAH\_\_\_17

DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN TOKOH  
SETEMPAT\_\_\_18

KUNJUNGI JEMBATAN MUARA TEWEH-JINGAH  
DAN ISLAMIC CENTER BARITO UTARA, WAGUB  
KALTENG: KE DEPAN BISA JADI POTENSI  
WISATA\_\_\_18

FOTO-FOTO KEGIATAN PEMROV. KALTENG\_\_\_19

Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto disampaikan ke Biro Adminidtrasi Pimpinan Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/Fax (0536) 4200241

**Website** : <http://biroadpim.kalteng.go.id/>

**Facebook** : <http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>

**Twitter** : [http://www.twitter.com/setda\\_kalteng](http://www.twitter.com/setda_kalteng)

**Instragram** : @sekretariat.daerah.kalteng

**email** : [buletin.isenmulang@gmail.com](mailto:buletin.isenmulang@gmail.com)



## **BANTUAN SOSIAL TAHUN 2021 DILUNCURKAN**



**PANGKALAN BUN – BIRO ADPIM.** Mewakili Pemerintah Pusat, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menghadiri acara Peluncuran Bantuan Sosial Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual melalui video conference di Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Senin (4/1/2021).

Bantuan tersebut meliputi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan disalurkan dalam 4 tahap, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober, melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Kemudian, Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan nilai bantuan Rp200.000/bulan/KK dan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan nilai bantuan Rp300.000/bulan/KK yang akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia selama 4 bulan, yakni dari Januari hingga April 2021.

Selain diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI Joko Widodo kepada sejumlah penerima yang hadir di Istana Negara, bantuan tunai juga diserahkan secara simbolis oleh gubernur di 34 Provinsi di Indonesia yang terhubbung secara virtual.

“Dalam APBN 2021, Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi Covid-19. Kemudian kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” kata Presiden RI Joko Widodo.

Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini menjelaskan PKH ditargetkan menysasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp28,7 triliun. Sedangkan target pertama Kartu Sembako atau BPNT adalah 18,8 juta keluarga, dengan target anggaran sebesar Rp42,5 triliun. Adapun untuk BST, menysasar 10 juta keluarga, dengan total anggaran untuk program ini adalah Rp12

triliun.

Total anggaran yang disalurkan pada Januari 2021 sebesar Rp13,93 triliun, yakni PKH sebesar Rp7,17 triliun, Kartu Sembako Rp3,76 triliun, dan BST Rp3 triliun.

Bagi penerima bantuan yang sakit, lanjut usia, atau penyandang disabilitas, maka bantuan tersebut akan diantar langsung ke tempat tinggal masing-masing oleh petugas dari bank Himbara atau PT Pos Indonesia.

“Guna pemanfaatan yang bijak dan tepat, kami memberikan arahan penggunaan bantuan yang akan kami sampaikan, baik melalui publikasi leaflet, sosialisasi, maupun edukasi, yang disampaikan oleh petugas bank maupun PT Pos,” jelas Mensos Tri Rismaharini.

Dipaparkannya, PKH dapat digunakan secara bijak dan tepat untuk peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha, dan tabungan. Kartu Sembako dapat digunakan untuk berbelanja di e-Warong atau tempat-tempat penjualan makanan dengan kandungan bahan pokok karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sumber vitamin, dan mineral. Sedangkan BST, dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, seperti beras, jagung, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras. Untuk hal tersebut, kami mohon dukungan dari semua stakeholder dan media untuk terus menyosialisasikan di lapangan, terutama keluarga penerima Bansos (bantuan sosial),” urai Mensos.

Sementara itu, berdasarkan data Rekapitulasi Penerima Bantuan Pusat untuk 14 Kabupaten/Kota di Kalteng, jumlah penerima bantuan PKH secara keseluruhan mencapai 48.878 KK, penerima bantuan Sembako mencapai 98.936 KK, dan penerima BST mencapai 69.108 KK.

Atas nama seluruh masyarakat Kalteng, Gubernur Sugianto Sabran mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat dalam bentuk Bantuan Sosial ini. Gubernur pun mengingatkan masyarakat penerima bantuan untuk menggunakan bantuan dengan bijaksana.

“Bapak/Ibu penerima bantuan PKH, BLT, Sembako, kita bersama-sama ketahui apa yang disampaikan Bapak Presiden, jangan sampai bantuan ini nantinya dibelikan rokok, minuman keras, atau Narkoba. Belilah Sembako, hal-hal yang bermanfaat dan jangan disiasiakan, termasuk nanti jika ada BLT dari Provinsi, ini juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” imbau Gubernur seraya berharap bantuan ini bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Tampak hadir dalam acara di Kantor Bupati Kotawaringin Barat hari ini, antara lain Wakil Bupati Ahmadi Riansyah, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Suyanto, dan Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalteng Rian Tangkudung. (ran/win/dew/ist).

## **SEKDA KALTENG HADIRI PENANDATANGANAN KONTRAK TENDER DINI KEMENTERIAN PUPR TA 2021 VIA VICON**



PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), menghadiri acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran (TA) 2021 melalui Video Vonference (Vicon) dari Ruang Rapat Bajakah II, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya pada Jumat (15/1/2021).

Penandatanganan Kontrak Tender tersebut disaksikan secara virtual via Vicon oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Kepresidenan, Bogor. Acara ini diikuti pula melalui konferensi video oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Pejabat Eselon I Kementerian PUPR, para Kontraktor, Konsultan, dan Kepala Balai di seluruh Indonesia.

Dari Auditorium Kementerian PUPR, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa sejak bulan Oktober 2020 Kementerian PUPR telah melaksanakan Tender Seleksi Dini untuk 3.175 paket, dengan nilai total Rp 38,6 triliun. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2021 dalam rangka memperkuat dan mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Hingga hari ini, 15 Januari 2021, telah diselesaikan proses tender 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun, dengan rincian 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai tender dan dikontrak bulan Desember 2020. 982 paket senilai Rp. 12,5 triliun akan ditandatangani kontraknya secara serentak pagi hari ini yang akan disaksikan langsung oleh Bapak Presiden," lapor Menteri Basuki.

Ditambahkan pula oleh Menteri PUPR, penandatanganan kontrak ini dilaksanakan secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa di kantor-kantor Balai PUPR di 34 provinsi. Untuk tahap selanjutnya, 1.184 paket senilai Rp 24 triliun akan diselesaikan dan ditandatangani kontraknya di akhir Februari 2021. Kemudian, pada bulan Maret 2021, akan pula diselesaikan 1.553 paket senilai Rp 40 triliun. Sedangkan sisanya, akan diselesaikan paling lambat bulan Maret 2021.

Sementara itu, saat memberikan arahan, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas upaya

percepatan anggaran 2021 yang dilakukan Kementerian PUPR. "Saya memberikan penghargaan, apresiasi atas upaya Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini," ungkap Presiden.

Presiden pun mengatakan bahwa pada APBN Tahun 2021 Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran terbesar senilai Rp 149,8 triliun. Untuk itu, Presiden menegaskan supaya penggunaan anggaran yang sangat besar tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. "Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali," tegas Presiden.

Dijelaskan oleh Presiden, bergeraknya kembali sektor konstruksi bukan saja memberikan kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tetapi juga akan menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi dan kontraktor. Selain itu, juga akan memberikan multiplier effects yang luas bagi industri yang terkait dengan konstruksi, menggerakkan industri baja, besi, semen, dan alat berat, serta termasuk juga sektor informal, seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya.

Menghadapi kondisi krisis akibat pandemi Covid-19, Presiden meminta kepada Kementerian PUPR untuk dapat bekerja lebih cepat lagi, dengan semangat dan cara-cara extraordinary serta tata kelola pemerintahan yang baik. "Sekali lagi kuncinya adalah kecepatan kita dalam bekerja, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Saat masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan, terutama proyek-proyek yang padat karya sangat dinantikan dan sangat membantu meringankan beban masyarakat, terutama menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak," kata Presiden.

"Walaupun kita bekerja cepat, dengan cara-cara smart shortcut, tidak berarti kita mengabaikan tata kelola, kita mengabaikan governance, ini tidak boleh. Prosesnya harus benar, harus transparan, sesuai aturan, dan juga yang paling penting outcome-nya betul-betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita," pungkas Presiden. (set/bow).



## PROYEK KERETA API KALTENG KEMBALI DIBAHAS DALAM RAPAT PEMUTAKHIRAN DATA DAN RENCANA ALOKASI ANGGARAN 2022-2024

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Nurul Edy, mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri, menghadiri Rapat Pemutakhiran Data dan Rencana Alokasi Anggaran 2022-2024 secara virtual melalui video conference dari Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (26/1/2021).

Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ini dibuka oleh Tim KPPIP, yakni Kepala Bidang Pembiayaan Infrastruktur Djoko Wibowo, dari Ruang Rapat Sekretariat KPPIP, Gedung Pos Ibukota Lantai 6, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta.

Rapat digelar dalam rangka mendukung terlaksananya implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memerlukan prioritas dan rencana pengalokasian anggaran tahun 2022-2024 guna mendapatkan dukungan prioritas dalam pengalokasian anggaran.

Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Suroto melaporkan bahwa agenda rapat kali ini adalah evaluasi pemuktahiran data untuk sektor transportasi dan estimasi rencana alokasi anggaran 2022-2024. Terdapat 15 daftar proyek PSN sektor kereta yang disampaikan, termasuk proyek kereta api Puruk Cahu-Batanjung melalui Bangkuang, dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng selaku penanggung jawab proyek.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng

Yulindra Dedy menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah mengakomodasi tindak lanjut usulan Pemprov Kalteng yang disampaikan melalui surat pada awal tahun 2020. Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng sendiri telah melakukan review implementasi PSN di Provinsi Kalteng tersebut bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalteng.

Berdasarkan hasil review bersama BPKP Provinsi Kalteng terkait dokumen uji kelayakan, masih terdapat banyak hal yang perlu dikaji kembali karena sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini. "Kita perlu melakukan kajian-kajian ulang, sehingga nanti bisa melaksanakan Perpres 109 ini sebagaimana diharapkan," kata Yulindra.

Yulindra mengungkapkan banyak hal yang perlu menjadi perhatian bersama terkait PSN yang akan dilanjutkan dan dilaksanakan pada tahun 2021-2024 ini. Ia pun berharap proyek ini mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan. "Sehingga pada saatnya, PSN proyek kereta api di Kalteng, yakni Puruk Cahu-Batanjung melalui Bangkuang, dapat sesuai dengan catatan-catatan, kemudian sesuai dengan harapan dari pihak Pemprov Kalteng dan BPKP Provinsi Kalteng," jelasnya.

Tampak hadir pula mendampingi Asisten Bidang Ekobang Nurul Edy di Aula Eka Hapakat hari ini, antara lain Kepala Biro Administrasi Pembangunan Istani, Mewakili Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng, dan Mewakili Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng. (ran/kominfo kalteng).



## SERAP ASPIRASI, WAKIL KETUA MPR RI SJARIFUDIN HASAN BERI APRESIASI PEMDA KALTENG

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Wakil Ketua MPR RI Sjarifudin Hasan menyampaikan apresiasinya atas tingkat kehadiran atau partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kalimantan Tengah dalam diskusi membahas wacana amandemen UUD 1945 terkait GBHN, Selasa (28/1/2020). “Hari ini luar biasa pesertanya. Saya pikir ini yang paling banyak pesertanya dari 5 atau 6 provinsi yang saya kunjungi,” ungkapnya.

“Saya simpulkan animo yang ada karena adanya keinginan untuk keadaan yang lebih baik di masa mendatang,” jelas Wakil Ketua MPR RI Sjarifudin Hasan di sela diskusi.

Pertemuan Wakil Ketua MPR RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran digelar di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat tentang wacana amandemen yang kini tengah berkembang di mana 7 fraksi di MPR menyatakan setuju dan 3 fraksi lainnya menyatakan tidak setuju dilakukan amandemen karena dikhawatirkan menimbulkan keributan.

Tampak hadir dari Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya, Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri, unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal, dan sejumlah Kepala SOPD. Sementara itu, rombongan MPR RI terdiri dari Wakil Ketua MPR RI Sjarifudin Hasan, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Moehammad Jafar Hafsa, Kabag Set Wakil Ketua MPR RI M. Harris Purwa, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Michael Bangun.

Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya berharap wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait GBHN disikapi secara arif dan bijaksana. “Apabila dilihat dari sisi ketatanegaraan (wacana amandemen) menjadi penting agar pembangunan nasional menjadi lebih terarah dan komprehensif ke depannya. Walaupun saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan dengan adanya GBHN, maka pembangunan nasional akan lebih terarah dan penggunaan anggaran negara lebih terukur,” paparnya.

Meski demikian, Gubernur berharap pembahasan

tentang GBHN tidak menjadi komoditas politik dan menimbulkan kerancuan tentang sistem ketatanegaraan di Indonesia. “Perlu untuk diatur, dikaji kembali, dan dipertimbangkan ke depannya pembahasan tentang GBHN jangan sampai melebar kemana-mana. Jika mengadopsi sistem sebelumnya, GBHN merupakan produk MPR dan yang menjalankannya adalah Presiden yang merupakan mandataris MPR, sehingga Presiden ditunjuk oleh MPR, tidak dipilih langsung oleh rakyat,” jelas Gubernur.

Wagub Habib Ismail menambahkan, yang terpenting bagi masyarakat antara lain adalah adanya lapangan pekerjaan dan Sembako murah. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah yang terpenting adalah adanya sinkronisasi dan sinergitas dengan Pusat serta otonomi daerah agar dapat membangun daerah dengan inovasi yang dimiliki tanpa mengenyampingkan aturan-aturan dari Pemerintah Pusat. “Semoga era 2019-2024 adalah era yang bisa menyejahterakan masyarakat, terutama Kalimantan Tengah yang Berkah,” tutupnya.

Kepada media, Wakil Ketua MPR RI Sjarifudin Hasan menjelaskan bahwa salah satu sasaran MPR RI adalah aparat pemerintahan daerah. “Salah satu sasaran kami yaitu aparat Pemda. Kami ingin mendapat masukan, pandangan, dan saran tentang wacana tersebut. Pandangan yang diberikan sangat berarti dan betul-betul pada substansi persoalan, dan yang luar biasa, Wakil Gubernur yang memimpin diskusi. Saya bangga dan sangat berterima kasih terhadap partisipasi aparat Pemda Kalimantan Tengah,” katanya.

Acara dilanjutkan dengan penanaman pohon kayu ulin secara simbolis di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. “Alangkah bahagiannya orang yang tinggal di Kalimantan Tengah, salah satunya karena dapat menghirup udara yang sangat segar. Ini kesempatan yang langka. Ternyata salah satu kuncinya adalah dalam setiap kesempatan harus selalu ada penanaman pohon. Saya berterima kasih saya merupakan bagian dari rakyat Kalimantan,” ucap Wakil Ketua MPR RI Sjarifudin Hasan saat melakukan penanaman pohon.

Ia berharap jika berkesempatan kembali datang ke Palangka Raya, tanaman kayu ulin tersebut sudah semakin besar dan semakin meyakinkan masyarakat bahwa Kalimantan memang merupakan paru-paru dunia. (ran/ing/bow).

## **PEMROV DAN DPRD KALTENG SEPAKAT BAHAS LEBIH LANJUT TIGA RAPERDA**

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menghadiri Rapat Paripurna (Rapur) Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng, Kota Palangka Raya pada Senin (25/1/2021) sore.

Ada 2 agenda yang dibahas dalam Rapur yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Abdul Razak ini, yaitu: (1) Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah; dan (2) Pemandangan Umum Fraksi Pendukung DPRD terhadap 2 Raperda Usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Menyampaikan Pidato Pendapat Gubernur Kalteng terhadap Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak, Wagub Habib Ismail menegaskan bahwa Pemprov Kalteng menyambut baik adanya Raperda tersebut dan menyetujui untuk dibahas lebih lanjut menjadi Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Kalteng.

“Kami menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah, untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Wagub pun kemudian mengungkapkan bahwa keberadaan masyarakat adat menjadi salah satu komponen vital agar budaya bangsa tidak tergerus kemajuan zaman, terlebih di era globalisasi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Untuk itu, sangat penting untuk terus menjaga eksistensi masyarakat adat di Indonesia, khususnya Masyarakat Adat Dayak di Provinsi Kalteng. “Dengan adanya regulasi ini nanti, maka payung hukum dalam perlindungan maupun pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang telah dijamin oleh UUD 1945 dapat terwujud di Bumi Pancasila Tanah Berkah yang kita cintai bersama ini,” jelasnya.

“Semoga pada saat Raperda ini nanti ditetapkan menjadi Perda adalah solusi bagi permasalahan atau gesekan sosial antara masyarakat adat dengan kemajuan globalisasi maupun kehidupan sosial lain dalam bernegara di seluruh wilayah Kalimantan Tengah ini,” pungkasnya.

Selanjutnya, dalam Rapur tersebut, Fraksi-fraksi



Pendukung DPRD Provinsi Kalteng menyampaikan Pemandangan Umum terhadap 2 Raperda usulan Pemprov Kalteng. Sebanyak 7 Fraksi menyampaikan pandangannya, masing-masing yaitu Fraksi PDIP dengan juru bicara (Jubir) Alexius Esliter, Fraksi Partai Golkar dengan Jubir Hj. Siti Nafsiah, Fraksi Partai Demokrat dengan Jubir H. Muhajirin, Fraksi Partai Nasdem dengan Jubir Niksen S. Bahat, Fraksi Partai Gerindra dengan Jubir Kuwu Senilawati, dan Fraksi PKB dengan Jubir Evi Kahayanti, serta Fraksi Gabungan PAN, PKS, PPP, Perindo, dan Hanura (P4H) dengan Jubir Sengkon.

Berdasarkan pandangan yang disampaikan, Fraksi-fraksi pendukung DPRD tersebut pada prinsipnya menerima kedua Raperda usulan Pemprov Kalteng untuk dapat dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, dengan memberikan sejumlah masukan, pendapat, dan juga pertanyaan. Pemandangan umum dari Fraksi-Fraksi tersebut nantinya akan diberikan tanggapan dan jawaban oleh Pemprov Kalteng pada rapat paripurna selanjutnya.

Turut pula hadir dalam Rapur ini, antara lain Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Faridawaty Darland Atjeh, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalteng, para Kepala Perangkat Daerah/Instansi Vertikal, Pimpinan Perguruan Tinggi/Perbankan atau yang mewakili, serta sejumlah tokoh masyarakat. (set/bow)



## **WAGUB KALTENG HADIRI RAPAT PARIPURNA KE-2 MASA SIDANGAN I TAHUN 2021**



PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menghadiri Rapat Paripurna (Rapur) Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021, Senin (18/01/2021), bertempat di DPRD Provinsi Kalteng.

Agenda Rapur yang dipimpin oleh Ketua DPRD Wiyatno ini, yaitu Pidato Pengantar Raperda Inisiatif DPRD oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalteng, Pidato Pengantar Gubernur Kalteng terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, serta Laporan Hasil Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalteng ke Daerah Pemilihan Kalteng I, II, III, IV, dan V pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020.

Dalam pidatonya, Wagub menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sangat menitikberatkan pada tertib administrasi, sehingga perlu ada aturan main yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan transparansinya.

“Dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban dan kewenangan ini, diperlukan payung hukum sebagai acuan dalam segala kebijakan yang perlu dilakukan atau diambil oleh Daerah,” ujar Wagub Kalteng.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalteng mengajukan Raperda tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalteng dalam pelaksanaan penyelenggaraan maupun pemanfaatan Administrasi Kependudukan.

“Dengan adanya Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini nanti, kita berharap sinergi baik tingkat Pusat sampai dengan Pemerintahan di tingkat paling bawah dapat meningkat, sehingga pembangunan akan lebih dirasakan masyarakat Kalimantan Tengah,” beber Wagub Habib Ismail.

Pada kesempatan ini pula, Wagub Kalteng menyampaikan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka Perda Nomor 4 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Adapun substansi yang perlu dilakukan penyesuaian, antara lain kedudukan Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah. Selain itu, penyesuaian terhadap Tugas dan Wewenang Majelis itu sendiri. Raperda yang diusulkan, yaitu mengubah struktur dan substansi pada Perda Nomor 4 Tahun 2013.

“Raperda yang diusulkan tidak berupa Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2013, namun Raperda baru yang telah disesuaikan dengan kebutuhan kita maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan Perda baru nanti yang kami anggap lebih sempurna, pelaksanaan tuntutan ganti kerugian daerah dapat dilakukan dengan lebih baik dan terukur, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh seluruh pihak,” pungkas Wagub Kalteng Habib Ismail. (win/ben)



## **DIBUKA PRESIDEN, GUBERNUR KALTENG HADIRI RAKERNAS PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2021 SECARA VIRTUAL**



PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 secara virtual melalui konferensi video dari Aula Serba Guna, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya pada Senin (11/1/2021).

Rakernas ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara, Jakarta. Turut mendampingi Presiden di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Rakernas Pembangunan Pertanian ini digelar dalam rangka membahas program Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2021, dengan tema “Memperkuat Peran Sektor Pertanian dalam Menopang Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19”. Rakernas ini diikuti pula secara virtual oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia beserta Kepala Dinas Pertaniannya masing-masing.

Saat memberikan arahan, Presiden menjelaskan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19, sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral, terlebih FAO telah memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Seiring pula dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta lebih, pembangunan pertanian juga harus benar-benar diperhatikan secara detil, terutama komoditas pertanian yang impor, seperti kedelai, jagung, gula, dan bawang putih.

Menurut Presiden Joko Widodo, pembangunan itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional, tetapi harus dibangun kawasan pertanian dengan skala lebih luas, salah satunya program Food Estate. “Kita

harus membangun kawasan yang economic scale, enggak bisa kecil-kecil lagi. Itu kenapa saya dorong Food Estate ini harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini, yang di Sumatra Utara, yang di Kalimantan Tengah itu, selesaikan,” kata Presiden.

Presiden selanjutnya menegaskan komitmen Pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui program Food Estate tersebut. “Kita mau evaluasi problemnya apa, masalah lapangannya apa, teknologinya kurang apa, dan juga dengan cara-cara teknologi, bukan cara-cara konvensional di Food Estate ini. Karena, ini akan menjadi contoh. Kalau ini benar, bisa dijadikan contoh semua provinsi. Tapi, memang dalam skala yang luas, percuma bisa berproduksi tetapi sedikit, enggak akan ngaruh apa-apa terhadap yang impor-impor tadi,” lanjut Presiden dengan tegas.

“Saya minta betul-betul di lapangannya diikuti, sehingga nantinya apabila di 2 provinsi ini lumbung pangan yang kita bangun, Food Estate yang kita bangun betul, benar, provinsi-provinsi yang lain akan kita dorong, kita berikan dana dari APBN, tetapi betul-betul ada return ekonomi yang diberikan kepada negara,” pungkas Presiden.

Tampak mendampingi Gubernur Kalteng mengikuti acara Rakernas tersebut, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy, Inspektur Supto Nugroho, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sunarti, Kepala Dinas Kehutanan yang juga selaku Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sri Suwanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Shalahuddin, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Katma F. Dirun, Kepala Biro Hukum Saring, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lilis Suryani, dan Plt. Kepala Biro Perekonomian Said Salim. (set/foto: bow/diskominfo kalteng).

## **WAGUB KALTENG HADIRI PENYERAHAN VIRTUAL SK PERHUTANAN SOSIAL DAN TORA SE-INDONESIA OLEH PRESIDEN**

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menghadiri acara Penyerahan SK Hutan Sosial, SK Hutan Adat, dan SK Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Se-Indonesia oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual melalui konferensi video dari Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya pada Kamis (7/1/2021) siang.

Turut mendampingi Wagub Kalteng Habib Ismail mengikuti acara Penyerahan Virtual SK tersebut, antara lain Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) M.R. Karliansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy, serta 30 orang perwakilan penerima SK Perhutanan Sosial (PS) dan TORA. Tampak pula hadir, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Samparaja, dan beberapa pejabat dari instansi terkait.

Acara penyerahan SK Perhutanan Sosial dan TORA ini dilaksanakan secara terpusat di Istana Negara Jakarta dan diikuti oleh berbagai provinsi di Indonesia melalui konferensi video. "Dalam acara ini hadir anggota masyarakat dan Gubernur secara simultan di Istana Negara dan virtual di provinsi-provinsi di Indonesia, kecuali DKI dan DIY, Bapak Presiden," kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam laporannya.

Menteri Siti Nurbaya kemudian melaporkan rincian SK Perhutanan Sosial dan TORA yang diberikan ke tiap-tiap provinsi, termasuk Provinsi Kalteng. "Kalimantan Tengah, Hutan Sosial 206 ribu hektare, 18.290 KK. Hutan Adat 102 hektare, redistribusi tanah 12.700 hektar, 1.210 KK, dan alokasi redistribusi tanah 225.500 hektare," sebut Menteri LHK.

Dilaporkan pula oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, bahwa sampai dengan akhir Desember 2020, pemberian akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial mencapai 4,42 juta hektare untuk 895.800 Kepala Keluarga. Hutan Adat telah ditetapkan 75 SK bagi 75 Kelompok Masyarakat Hukum Adat, dengan 39.370 KK pada area 56.900 hektare yang tersebar di 15 provinsi.

Sementara itu, saat memberikan arahan, Presiden menjelaskan bahwa dalam 5 tahun terakhir, Pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset, karena hal ini terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan dan lingkungan sekitar hutan. Redistribusi aset ini juga menjadi



salah satu jawaban untuk penyelesaian berbagai sengketa agraria. "Karena itu, Pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset ini, baik melalui kebijakan perhutanan sosial dan reforma agraria," tegas Presiden.

Presiden Joko Widodo kemudian menyampaikan bahwa pada hari ini diserahkan sebanyak 2.929 SK Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia, dengan luas sekitar 3.442.000 hektare bagi kurang lebih 651 ribu KK. Selain itu, diserahkan juga 35 SK Hutan Adat seluas 37.500 hektare dan 58 SK TORA seluas 72 ribu hektare di 17 Provinsi.

"Berkali-kali sudah saya sampaikan, saya tidak ingin hanya sekedar membagi-bagikan SK. Ini akan saya ikuti, akan saya cek terus untuk memastikan lahan ini memang betul-betul dipakai untuk kegiatan-kegiatan produktif, tidak ditelantarkan, tetapi terus dikembangkan, sehingga memiliki manfaat yang besar bagi ekonomi kita, bagi ekonomi masyarakat," terang Presiden.

Oleh karena itu, Presiden meminta kepada Kementerian terkait untuk dapat membantu kelompok-kelompok perhutanan sosial mendapatkan kemudahan untuk akses permodalan, seperti melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Desa. Kemudian, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga diminta untuk memberikan pendampingan, terutama berkaitan dengan manajemen dan teknologi.

"Saya minta dilakukan terobosan-terobosan kebijakan yang terkonsolidasi dan terintegrasi antara Kementerian, Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sehingga program Perhutanan Sosial ini betul-betul memberikan dampak yang signifikan kepada pemerataan ekonomi, pada keadilan ekonomi rakyat kita, tanpa mengganggu fungsi hutan dan ekosistemnya," tandas Presiden.

Lebih lanjut, dalam sesi wawancara usai kegiatan, Wagub Kalteng Habib Ismail Bin Yahya atas nama Pemerintah Provinsi Kalteng menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Pusat. "Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden dan Menteri LHK yang telah memberikan penetapan Hutan Sosial, Hutan Adat, dan TORA. Kita mengharapkan Hutan Sosial, Hutan Adat tadi benar-benar bermanfaat dan bisa mengangkat derajat ekonomi masyarakat," untkan Wagub Kalteng. (set/eka).





## PEMROV KALTENG LUNCURKAN BUKU PEDOMAN TATA CARA PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) meresmikan Peluncuran Buku Pedoman Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Provinsi Kalteng, Kamis (28/01/2021), bertempat di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur, Palangka Raya.

Kegiatan ini diikuti secara virtual melalui video conference oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Alue Dohong dan Direktur Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Djoko Hendratto, serta perwakilan dari tiap Kabupaten/ Kota se-Kalteng.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda, Gubernur Kalteng mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan Peluncuran Buku Pedoman Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalteng yang diselenggarakan pada hari ini merupakan bukti nyata upaya pemerintah Provinsi Kalteng untuk mendorong keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya ingin menegaskan kembali, bahwa kita sebagai pengambil kebijakan, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota, agar dapat bersatu padu untuk mendorong terbentuknya MHA, baik yang keberadaannya lintas kabupaten/kota

maupun dalam wilayah pemerintah kabupaten/kota. Hal ini karena hingga saat ini yang sudah mendapatkan Penetapan Kawasan Hutan Adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia hanya Kabupaten Pulang Pisau, yaitu berada di Desa Jabiren,” beber Gubernur Kalteng.

Adapun buku pedoman yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng ini merupakan bagian dari kinerja yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalteng, bekerjasama dengan Borneo Nature Foundation (BNF) Indonesia sebagai mitra Pemerintah Provinsi Kalteng.

“Hal ini berkaitan dengan beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam mempedomani pelaksanaan dari amanah peraturan yang berlaku,” pungkas Gubernur Kalteng.

Selanjutnya, buku ini akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kalteng dan juga pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng dalam melakukan proses identifikasi, verifikasi, dan validasi dari usulan MHA.

Bertindak sebagai keynote speaker dalam kegiatan ini adalah Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Alue Dohong, Direktur Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Djoko Hendratto, dan juga Fahrizal Fitri selaku Ketua Panitia MHA Provinsi Kalteng. (win/boy)



## **WAKIL GUBERNUR KALTENG HADIRI PELANTIKAN BADAN PELAKSANA HARIAN DAN DIREKSI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA**

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menghadiri acara Pelantikan Badan Pelaksana Harian (BPH) dan Direksi Rumah Sakit Islam (RSI) PKU Muhammadiyah Palangka Raya Masa Jabatan 2021-2024 yang digelar di ruang pertemuan Ballroom Swiss-Bel Hotel Danum pada Rabu (13/1/2021).

Pelantikan BPH dan Direksi Rumah Sakit tersebut dilakukan oleh Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Provinsi Kalteng H. Ahmad Syar'i berdasarkan surat Keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 4714/KEP/1.0/D 2020 tentang Pengangkatan Direksi Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya Masa Jabatan 2021-2024.

Adapun Badan Pelaksana Harian RSI PKU Muhammadiyah Palangka Raya yang dilantik hari ini, terdiri dari dr. Dini Mirsanti, Sp.Kj. sebagai Ketua, Drs. Mulyono, M.Pd. sebagai Sekretaris, serta Drs. Muchtar, M.Si., Dra. Nurhayati, M.T., M.M., dan Sofia Winda Antemas, S.K.M., M.Kes. sebagai anggota.

Sementara itu, untuk Direksi yang dilantik, yaitu dr. Lia Indriana sebagai Direktur, dr. Sulistyaningsih, Sp.K.K. sebagai Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan Medik, dr. Widi Yuli Harianto, Sp.An. sebagai Wadir Penunjang Medik, serta Dr. Jairo, M.Pd. sebagai Wadir Keuangan, Umum, dan Kemuhammadiyah.

Pada kesempatan ini, Wagub Habib Ismail menyampaikan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Kalteng kepada RSI PKU Muhammadiyah atas peran serta dan kontribusinya selama ini dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kalteng, termasuk juga dukungan dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan adanya Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) yang sangat membantu penanganan pasien Covid-19 hingga sampai pada proses pemakaman.

Dalam sesi wawancara usai kegiatan, Wagub Kalteng pun menyampaikan ucapan selamat kepada BPH dan Direksi yang telah dilantik. "Kami mewakili pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat atas pelantikan Badan Pelaksana Harian dan juga Direksi Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya ini," ungkapnya.

Wakil Gubernur pun berharap agar ke depan RSI PKU Muhammadiyah Palangka Raya dapat terus meningkatkan pelayanan melalui pengembangan kompetensi para dokter dan tenaga medis lainnya serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana RS. "Kita harapkan ke depan Rumah Sakit Muhammadiyah bisa semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat," pungkash Wagub Habib Ismail.

Lebih lanjut, pelantikan ini dirangkai pula dengan acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) antara BPH dan Direksi RSI PKU Muhammadiyah Palangka Raya masa jabatan sebelumnya dengan yang baru saja dilantik. Turut pula hadir pada acara pelantikan dan Sertijab ini, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul, Direktur RSI PKU Muhammadiyah Palangka Raya masa jabatan sebelumnya dr. Suyanto, Sp.P.D., dan sejumlah Direktur Rumah Sakit di Kota Palangka Raya. (set/nov/eka).





## PEMERINTAH SIAPKAN LANGKAH ANTISIPASI PENULARAN COVID-19 DI TAHUN 2021

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah menyampaikan press release perkembangan penanganan pandemi Covid-19 pada Jumat (1/1/2021). Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi penularan Covid-19 di tahun 2021. Hal ini dikarenakan tren kasus positif Covid-19 yang belum menunjukkan adanya penurunan signifikan.

Melalui Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyebut langkah pertama adalah semakin memperketat disiplin protokol kesehatan untuk memastikan masyarakat sepenuhnya patuh. Penegakan disiplin ini akan terus dilakukan hingga nanti seluruh masyarakat mendapatkan vaksin dan tercapainya herd immunity (kekebalan kelompok).

Kedua, upaya 3T, yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan) terus diperkuat. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dan kontak erat yang positif dapat dideteksi lebih cepat dan juga memperoleh penanganan kesehatan sesuai standar.

Langkah ketiga, jika kasus positif masih tinggi, dilakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Penting diketahui, mobilitas masyarakat yang tidak terkendali selama pandemi ini sangat berpotensi meningkatkan angka penularan. Oleh karena itu, dengan pembatasan mobilitas ini diharapkan dapat menekan penularan yang terjadi. Pembatasan ataupun pelonggaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah merupakan aspek yang harus dilakukan sejalan dengan naik-turunnya kasus Covid-19.

Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah menyampaikan jumlah akumulasi data sampai dengan hari ini, Jumat (1/1/2021), yaitu jumlah pasien konfirmasi positif Covid-19 di Kalimantan Tengah bertambah sebanyak 95 orang dengan total kasus mencapai 9.779 orang. Penambahan pasien dinyatakan sembuh sebanyak 130 orang dengan total kasus mencapai 7.618 orang. Adapun total pasien dinyatakan meninggal dunia, sebanyak 269 orang, dengan tingkat kematian atau Case Fatality Rate (CFR) 2,8%.

Dalam press release tersebut, kembali disampaikan perkembangan data Covid-19, di mana 13 kabupaten dan 1 kota masih terdampak. Kasus Konfirmasi ada penambahan sebanyak 95 orang, yaitu di Palangka Raya 20 orang, Katingan 2 orang, Kotawaringin Timur 14 orang, Kotawaringin Barat 26 orang, Pulang Pisau 3 orang, Kapuas 2 orang, Barito Selatan 4 orang, dan Barito Timur

24 orang, sehingga dari semula sebanyak 9.684 orang menjadi 9.779 orang. Pasien sembuh ada penambahan sebanyak 130 orang, yaitu di Palangka Raya 10 orang, Kotawaringin Timur 49 orang, Kotawaringin Barat 4 orang, Seruyan 10 orang, Pulang Pisau 7 orang, Kapuas 2 orang, Gunung Mas 2 orang, Barito Timur 44 orang, dan Murung Raya 2 orang, sehingga dari semula 7.488 orang menjadi 7.618 orang. Kasus Suspek ada penurunan sebanyak 65 orang, sehingga dari semula 451 orang menjadi 386 orang. Kasus Probable tidak ada penambahan, sehingga tetap 52 orang. Dalam Perawatan ada penurunan sebanyak 35 orang, sehingga dari semula 1.927 orang menjadi 1.892 orang.

Dalam penanganan pandemi Covid-19 selama tahun 2020, salah satu tantangan berat yang dihadapi Pemerintah adalah aspek perubahan perilaku karena pada dasarnya Covid-19 adalah penyakit yang sangat erat hubungannya dengan perilaku masyarakat. Pemerintah telah membuat sistem monitoring Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Perubahan Perilaku untuk menekan penularan dan mengendalikan pandemi Covid-19.

Peluang transmisi penularan virus Covid-19 dipengaruhi kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan. Sangat dipahami bahwa pada awalnya mengubah sebuah perilaku dan mengadaptasi perilaku lain tidaklah mudah, namun bukan tidak mungkin.

Pemerintah berharap pada tahun 2021 ini, masyarakat tetap mengedepankan semangat dan optimisme karena dapat menjadi titik balik penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi apabila seluruh kebijakan dalam rangka upaya penanganan pandemi Covid-19 dipatuhi masyarakat. (rik).



## **GUBERNUR SUGIANTO SABRAN IKUTI RATAS RENCANA PELAKSANAAN VAKSINASI**

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi, Rabu (6/1/2020) secara virtual melalui video conference dari Kantor Bupati Kotawaringin Barat.

Dalam rapat ini Presiden Jokowi menyampaikan bahwa vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dan tahap pertama akan dimulai pekan depan. Pemerintah telah memesan sebanyak 329.500.000 vaksin yang pengaturannya akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan.

Adapun jumlah dosis vaksin yang telah dipesan (firm order), yaitu dari Sinovac 3.000.000 yang sudah tiba di Tanah Air dan ditambah lagi 122.500.000. Kemudian, dari Novavax 50.000.000, dari COVAX/GAVI 54.000.000, dari AstraZeneca 50.000.000, dan dari Pfizer 50.000.000 vaksin.

“Oleh sebab itu, saya minta supaya betul-betul

dilakukan kontrol dan pengecekan semua kesiapan oleh para Gubernur,” ujar Presiden.

Pada kesempatan ini pula, Presiden kembali menegaskan bahwa strategi dalam menangani pandemi ini tetap sama, yaitu yang pertama urusan penanganan kesehatan, kedua perlindungan sosial, dan ketiga berkaitan dengan pemulihan ekonomi.

Untuk itu, penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) serta 3T (testing, tracing, dan treatment) dalam rangka mengendalikan penyebaran agar betul-betul bisa dilakukan di lapangan.

“Saya minta kepada para Gubernur agar mengencangkan kembali yang berkaitan dengan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Karena, berdasarkan survei, memang disiplin terhadap protokol kesehatan ini menurun,” pungkas Presiden Jokowi.

Turut pula hadir mendampingi Gubernur, antara lain Wakil Bupati Kotawaringin Barat Ahmadi Riansyah, Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kalteng Darliansjah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng Shalahuddin, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Sri Suwanto. (win/bpmi setpres/ist).



## **PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DI KALTENG DIMULAI HARI INI**

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pencanaan Pemberian Vaksinasi Covid-19 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur, Palangka Raya hari ini, Kamis (14/1/2021), menandai dimulainya program vaksinasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pada pencaangan hari ini, vaksinasi Covid-19 diberikan kepada pejabat publik Pemerintah Daerah Kalteng, organisasi profesi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, vaksinasi akan diberikan kepada masyarakat sesuai tahapan yang telah ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Selaku pejabat publik, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri beserta unsur Forkopimda Kalteng juga mendapatkan vaksinasi pada pencaangan hari ini untuk memberikan contoh bagi masyarakat di daerah, setelah sehari sebelumnya, Rabu (13/1/2021), Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara

lainnya telah terlebih dahulu mendapatkan vaksinasi di Istana Negara Jakarta.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Habib Ismail Bin Yahya menyampaikan harapan bahwa pencaangan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada pejabat daerah, organisasi profesi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Para pejabat dan tokoh juga diminta dapat membantu menangkal hoaks dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar bersedia menerima vaksin Covid-19.

“Menjadi harapan kita bersama dengan adanya pencaangan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada pejabat daerah, organisasi profesi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat menjadi contoh guna menumbuhkan rasa aman bagi masyarakat calon penerima vaksin Covid-19 berikutnya,” kata Wagub





Habib Ismail.

“Selanjutnya, kita harapkan pejabat daerah, organisasi profesi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat memberikan imbauan dan pengertian pada masyarakat bahwa kita pemerintah akan berupaya mengatasi pandemi Covid-19 hingga pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan secara serentak dan berjalan lancar,” Wagub menambahkan.

Vaksin Covid-19 tahap pertama telah diterima Provinsi Kalteng pada tanggal 5 Januari 2021 sebanyak 14.680 dosis atau 8 koli yang telah didistribusikan ke kabupaten/kota di Kalteng pada tanggal 9-11 Januari 2021.

Kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 dibagi dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, vaksinasi akan diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan dan penunjang fasilitas pelayanan kesehatan serta petugas tracing kasus Covid-19. Sedangkan pada tahap kedua, vaksinasi akan diberikan kepada petugas pelayanan publik esensial sebagai garda terdepan, seperti TNI, Polri, Satpol PP, dan petugas pelayanan publik transportasi, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.



Dalam laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul menyampaikan vaksinasi tahap pertama pada Bulan Januari-April 2021 menasar 19.927 SDM Kesehatan, di mana pada Bulan Januari dilaksanakan di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau untuk sebanyak 4.462 SDM Kesehatan.

Pada vaksinasi tahap pertama tersebut, diperlukan 39.845 vial vaksin untuk 2 dosis pemberian bagi tiap sasaran. Adapun jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebanyak 230 Fasyankes, terdiri dari 204 Puskesmas, 18 Rumah Sakit, dan 8 Klinik, dengan jumlah vaksinator yang terlatih sebanyak 250 orang.

Sebelum menerima vaksinasi hari ini, Sekda Fahrizal Fitri menjalani screening terlebih dahulu oleh petugas kesehatan di lokasi. Selepas Sekda, giliran berikutnya mendapatkan vaksinasi pada pencaanangan hari ini adalah Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul, Plt. Kepala BPBPK Darlansjah, Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Yayu Indriaty, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalteng Mikko Uria Mapas Ludjen, Kepala Badan POM Palangka Raya Leonard Duma, dan Sekretaris Umum MUI Bulkani.

Dalam jumpa pers usai vaksinasi, Wagub Habib Ismail meminta masyarakat tidak menolak vaksinasi demi kemaslahatan bersama. “Andaikata nanti dapat giliran divaksin, diharapkan masyarakat menerima demi kemaslahatan bersama. Dan, Bapak-bapak pejabat ini nanti akan diobservasi setelah divaksin. Mudahan tidak ada efek samping,” ujar Wagub.

“Mudah-mudahan dengan pencaanangan vaksinasi ini, Kalimantan Tengah bisa bebas dari Virus Corona, Covid-19,” imbuh Wagub Habib Ismail yang dalam jumpa pers kali ini didampingi Sekda Fahrizal Fitri, Ketua DPRD Kalteng, Kapolda Kalteng, Danrem 102/Pjg, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Plt. Kepala BPBPK, Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dan Sekretaris Umum MUI.

Sekda Kalteng dalam testimoninya usai divaksin mengungkapkan bahwa pemberian vaksinasi berjalan lancar dan tidak terasa sakit. “Saat divaksin tidak merasa sakit, Alhamdulillah. Kami sebagai pejabat publik dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada seluruh warga Kalimantan Tengah. Jangan ragu untuk menerima vaksinasi,” ungkap Sekda Fahrizal Fitri.

“Seluruh elemen hari ini hadir. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman dan terpercaya untuk disuntikkan ke tubuh,” kata Sekda seraya berharap perekonomian Kalteng dapat bergerak normal kembali setelah pandemi Covid-19 berlalu. (ran/sop/dmr)

## **PENGENDALIAN COVID-19 PADA TAHUN 2021 DIPRIORITASKAN PADA PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN VAKSIN BAGI MASYARAKAT**

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pengendalian pandemi Covid-19 pada tahun 2021 akan diprioritaskan pada penyediaan dan pemberian vaksin pada seluruh masyarakat Indonesia. “Pemerintah terus mengikuti perkembangan vaksinasi yang telah dilakukan beberapa negara di dunia, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada yang telah melakukan vaksinasi di tahun 2020,” demikian disampaikan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam rilis hari ini, Sabtu (2/1/2021).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan ada 2 jalur kerjasama dalam pengadaan kandidat vaksin Covid-19, yaitu hasil kerjasama bilateral atau multilateral dan pengembangan vaksin Merah Putih. Untuk vaksin Merah Putih, merupakan hasil kerjasama perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Pada triwulan pertama tahun 2021, vaksin Merah Putih akan diserahkan PT Bio Farma untuk dilakukan uji klinis dan praklinis sebelum mendapat izin edar.

Sementara itu, dalam skema kerjasama bilateral, di antaranya ada vaksin Sinovac yang merupakan hasil kerjasama dengan negara Tiongkok (China) serta vaksin Novavax dan Prfizer yang merupakan hasil kerjasama dengan Amerika Serikat. Selain itu, ada pula vaksin Astra Zeneca dalam skema kerjasama ini. Adapun pada skema kerjasama multilateral yang dikoordinasi oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), ada vaksin Covax atau Gavi.

Banyaknya kandidat vaksin yang telah ditetapkan pemerintah bertujuan untuk memastikan kebutuhan vaksin dalam negeri tercukupi, sehingga mampu menciptakan kekebalan komunitas. Vaksinasi sendiri nantinya akan diberikan secara bertahap, diawali dari petugas kesehatan, petugas publik, dan lanjut usia (Lansia) pada kuartal pertama tahun 2021. Selanjutnya, vaksinasi akan diberikan kepada masyarakat dan wilayah penduduk rentan serta masyarakat lainnya dengan mempertimbangkan kluster penularan pada kuartal kedua tahun ini atau sekitar April 2021 sampai dengan Maret 2022.

Berkaitan dengan berbagai informasi yang ramai di media sosial tentang hasil rapid tes Covid-19 yang dipalsukan dan terdapat indikasi transaksi jual beli, Tim Satgas Covid-19 Kalteng menegaskan bahwa hal ini dapat berujung pada sanksi pidana. “Dari segi hukum pidana, tindakan menyediakan surat keterangan dokter palsu dapat dijatuhkan sanksi. Sanksi diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 267 ayat 1 serta pasal 268 ayat 1 dan 2, dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun,” jelas Tim Satgas dalam rilisnya hari ini.

Masyarakat diminta untuk menghindari melakukan praktek kecurangan tersebut dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya praktek semacam itu karena jika dibiarkan dapat berdampak pada penularan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat secara tidak terkendali. “Maka jangan pernah bermain-main dengan hal ini,” tegas Tim Satgas Covid-19 Kalteng.

Selanjutnya, Tim Satgas Covid-19 Kalteng menyampaikan perkembangan data Covid-19 yang dihimpun akumulasinya pada 2 Januari 2021 pukul 15.00 WIB, sebagai berikut: sebanyak 13 kabupaten dan 1 kota sudah terdampak. Kasus konfirmasi ada penambahan sebanyak 59 orang, yaitu di Palangka Raya 12 orang, Katingan 3 orang, Kotawaringin Timur 1 orang, Kotawaringin Barat 14 orang, Sukamara 8 orang, Pulang Pisau 1 orang, Kapuas 4 orang, Gunung Mas 6 orang, Barito Selatan 9 orang, dan Barito Timur 1 orang, sehingga dari semula sebanyak 9.778 orang menjadi 9.837 orang.

Untuk pasien sembuh, ada penambahan sebanyak 124 orang, yaitu di Palangka Raya 4 orang, Katingan 7 orang, Kotawaringin Timur 17 orang, Kotawaringin Barat 15 orang, Lamandau 5 orang, Sukamara 28 orang, Kapuas 14 orang, Gunung Mas 24 orang, Barito Selatan 9 orang, dan Murung Raya 1 orang, sehingga dari semula 7.618 orang menjadi 7.742 orang.

Kasus Suspek ada penambahan sebanyak 1 orang, sehingga dari semula 386 orang menjadi 387 orang. Kasus Probable ada penambahan sebanyak 4, sehingga dari semula 52 orang menjadi 56 orang. Dalam Perawatan ada penurunan sebanyak 66 orang, sehingga dari semula 1.891 orang menjadi 1.825 orang. Sedangkan Kasus Meninggal, ada penambahan sebanyak 1 orang, yaitu di Seruyan, sehingga dari semula 269 orang menjadi 270 orang. Tingkat kematian atau Case Fatality Rate (CFR) 2,7%.

Disampaikan pula, jumlah orang yang diperiksa swab atau suspek ada penambahan sebanyak 76 orang, sehingga dari semula 34.465 orang menjadi 34.541 orang. Sedangkan jumlah spesimen, ada penambahan sebanyak 528 orang, sehingga dari semula 82.936 spesimen menjadi sebanyak 83.464 spesimen. (ran).



## WAKIL GUBERNUR RESMIKAN ATM BANK KALTENG DI DESA BATU AGUNG KECAMATAN SERUYAN TENGAH



SERUYAN TENGAH – BIRO ADPIM. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Kabupaten Seruyan, Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya meresmikan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Kalteng di Desa Batu Agung, Kecamatan Seruyan Tengah pada Jumat (29/1/2021) pagi.

Tampak mendampingi Wakil Gubernur Kalteng dalam peresmian ATM tersebut, di antaranya Pemimpin PT Bank Kalteng Cabang Pembantu Rantau Pulut Taufan Indrayana, Camat Seruyan Tengah Primermen, dan Kapolsek Seruyan Tengah Iptu Robertus Sonny A.W.

Acara peresmian ATM Bank Kalteng ini ditandai secara simbolis dengan pemotongan pita dan dilanjutkan dengan penarikan perdana uang tunai dari mesin ATM oleh Wagub Kalteng Habib Ismail. “Hari ini kita sudah meresmikan ATM di Desa Batu Agung, Kecamatan Seruyan Tengah. Dan, ini bukti uang perdana yang ditarik dari mesin ATM. Sukses untuk Bank Kalteng,” ungkap Wagub Habib Ismail.

Dalam keterangan persnya, Wagub Habib Ismail

mengungkapkan bahwa keberadaan ATM ini diharapkan dapat memberi kemudahan pelayanan transaksi keuangan bagi masyarakat setempat. “Kita harapkan dengan keberadaan ATM ini, maka masyarakat bisa lebih terbantu, khususnya dalam bertransaksi elektronik atau mengambil uang di Bank Kalteng,” kata Wagub Kalteng.

Wagub Habib Ismail kemudian juga berharap Bank Kalteng dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penyediaan mesin ATM, agar dapat menjangkau semua kecamatan di Kalteng. Hal ini dinilai Wagub, juga dapat sekaligus menumbuhkan perekonomian di daerah tersebut.

“Kita harapkan juga Bank Kalteng, dengan adanya ATM-ATM ini, juga bisa menyiapkan ATM-ATM di seluruh kecamatan di Kalimantan Tengah, untuk bisa sama-sama membantu dan menggerakkan geliat ekonomi di Kalimantan Tengah,” ucap Wagub Kalteng Habib Ismail.

Sementara itu, Pemimpin PT Bank Kalteng Cabang Pembantu Rantau Pulut Taufan Indrayana mengatakan bahwa saat ini ada 3 ATM Bank Kalteng di Kecamatan Seruyan Tengah, yaitu di Kantor Cabang Pembantu Rantau Pulut 1, Desa Sukorejo, dan Desa Batu Agung yang baru saja diresmikan. “Khusus Kecamatan Seruyan Tengah ada 3 (ATM), karena Seruyan Tengah ini luas tempatnya, dan akses perekonomian memang bagus di sini,” kata Taufan.

Taufan Indrayana selanjutnya juga menjelaskan beberapa rencana pengembangan layanan Bank Kalteng di Kabupaten Seruyan. “Ke depannya, tahun ini, Insya Allah, ada Kantor Kas dan ATM di Tumbang Manjul, (Kecamatan) Seruyan Hulu, dengan di Sukorejo nanti akan menjadi Cabang Pembantu, supaya bisa mengelola keuangan daerah sini,” jelasnya.

Usai meresmikan ATM Bank Kalteng di Desa Batu Agung, Wagub Kalteng Habib Ismail kemudian melanjutkan kunjungannya, dengan melakukan peninjauan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Rantau Pulut II. (set/dmr).



## **DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN TOKOH SETEMPAT**

BUNTOK – BIRO PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menggelar pertemuan dengan Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tomas, Toga, Todat, dan Toda, serta Pelaku UKM dan IKM se-Kabupaten Barito Selatan di Gedung Jaro Pirarahan, Buntok, Kamis (23/01/2020).

Pertemuan digelar untuk menyerap aspirasi dan mencari masukan bagi perbaikan jalannya pembangunan di Bumi Tambun Bungai. Dialog dan tanya jawab dengan para undangan yang hadir dipandu oleh Bupati Barito Selatan.

Pada pertemuan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa visi misi gubernur, bupati, dan walikota dalam 5 tahun ini adalah perbaikan dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, gorong-gorong, pelabuhan udara, dan pelabuhan sungai. “Perlu kerja keras untuk membangun Kalteng,” katanya.

Menurut Gubernur, tugas utama sebagai pemimpin daerah, antara lain menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat melakukan pembangunan di Kalteng. “Jembatan yang didanai APBD akan kami resmikan besok sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan

dana masyarakat,” imbuhnya.

Disampaikan pula bahwa Pemprov juga mengambil kebijakan terkait kesehatan. “Tidak ada masyarakat yang ditolak di rumah sakit provinsi,” tegas Gubernur.

“Kami siapkan dana, karena itu tugas pimpinan wajib melayani masyarakat miskin. Kami yang mengobati, kami yang membiayai, jangan takut,” Gubernur memaparkan.

Berkaitan dengan masalah pendidikan, Gubernur menyampaikan bahwa sejauh ini sudah ada 5000 mahasiswa S1 yang mendapat beasiswa Bidik Misi dari Pemprov Kalteng.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan. “Silakan sampaikan kritik, tapi tetap jaga kerukunan dan falsafah Huma Betang,” pungkasnya.

Pertemuan ini, antara lain juga dihadiri Plt. Kadis Perhubungan, Plt. Kadis Pendidikan, Plt. Kepala Dinas Sosial, Plt. Kadis Ketahanan Pangan, Kadis TPHP, Kadis Perkimtan, Kadis PUPR, Kadisbudpar, serta Kadis Koperasi Provinsi, serta Plt. Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik, dan Kepala Biro Umum. (ran/eka)

## **KUNJUNGI JEMBATAN MUARA TEWEH-JINGAH DAN ISLAMIC CENTER BARITO UTARA, WAGUB KALTENG: KE DEPAN BISA JADI POTENSI WISATA**

MUARA TEWEH – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya beserta istri Hj. Rayuhani Binti Ruslan dan didampingi Bupati Barito Utara (Barut) Nadalsyah meninjau langsung Jembatan Penyeberangan Muara Tewehe-Jingah, Kota Muara Tewehe, Kabupaten Barito Utara pada Sabtu (23/1/2021).

Jembatan Muara Tewehe-Jingah ini membentang di atas Sungai Barito dan menghubungkan Kota Muara Tewehe dengan Kelurahan Jingah dan Jambu, Kecamatan Tewehe Baru. Jembatan ini akan menjadi akses penyeberangan untuk menuju lokasi Islamic Center yang juga diproyeksikan sebagai alternatif wisata religi di Kabupaten Barito Utara.

Pada kunjungannya tersebut, Wagub Kalteng Habib Ismail bersama dengan Bupati Barito Utara Nadalsyah menyusuri jembatan dengan berjalan kaki dan kemudian sekaligus melihat langsung progres pembangunan Islamic Center. Turut pula mendampingi, Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Sekretaris Daerah Barito Utara Jainal Abidin, dan Kepala Dinas PUPR Barito Utara.

Dalam sesi wawancara usai kegiatan peninjauan, Wagub Kalteng Habib Ismail Bin Yahya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara, khususnya Bupati Nadalsyah. Selanjutnya, menurut Wagub, pembangunan jembatan Muara Tewehe-Jingah dan Islamic Center tersebut tentunya akan menjadi



potensi pengembangan wisata, terutama wisata religi di Kabupaten Barito Utara.

“Banyak saya lihat di facebook, di instagram, orang yang berfoto di jembatan dengan latar belakang masjid ini atau Islamic Center ini. Kita ingin melihat langsung dan alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam,” ungkap Wagub Kalteng Habib Ismail Bin Yahya.

“Tadi sudah kita melintasi jembatan, memang kita lihat jembatan di tengah-tengah kota, membelah sungai, tengah pasar, ini sangat luar biasa, inovasi yang luar biasa untuk membentuk wisata lokal, dan mestinya nanti ke depan ini akan menjadi wisata religi,” pungkas Wagub Kalteng. (set/eka)





*Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 secara virtual melalui konferensi video dari Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Kota Pangkalan Bun pada Selasa (5/1/2021)*



*Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya menandatangani Pencanaan Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, Nanga Bulik, Jumat (22/1/2021).*

*Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran, melepas keberangkatan Tim Relawan Kesehatan untuk memperkuat bantuan penanganan banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, di depan Lobi Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya pada Selasa (19/1/2021).*





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**H. SUGIANTO SABRAN**  
Gubernur Kalimantan Tengah



**HABIB ISMAIL BIN YAHYA**  
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Mari patuhi  
protokol kesehatan  
dengan

**5M**



**Mencuci Tangan**



**Memakai Masker**



**Menjauhi  
Kerumunan**



**Menjaga Jarak**



**Mengurangi  
Mobilitas**



<http://biroadpim.kalteng.go.id/>



<http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>



[http://www.twitter.com/setda\\_kalteng](http://www.twitter.com/setda_kalteng)



[@sekretariat.daerah.kalteng](https://www.instagram.com/@sekretariat.daerah.kalteng)



[buletin.isenmulang@gmail.com](mailto:buletin.isenmulang@gmail.com)